**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan uraian tinjauan pustaka berupa *literatur review* teori-teori yang mendukung dalam asumsi penulis dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut berasal dari berbagai data sekunder dan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penunjang teori dan konsep yang akan penulis gunakan.

**A.Literatur Review**

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat bebrapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedy Permadi (2009) yang berjudul “Media Massa sebagai Instrumen Diplomasi Amerika Serikat dalam Kasus Invasi ke Irak dan Afganistan”. Penelitian ini menjelaskan tentang media massa yang memiliki peran di dalam pembentukkan citra atau *image* sebuah negara di mata negara lain didalam melakukan agenda diplomasinya. Adanya korelasi yang cukup untuk antara media massa dan diplomasi. Karena kedua hal tersebut memberikan kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi opini publik. Hal ini tidak terlepas oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa. Disisi lain, diplomasi merupakan *instrument* bagi suatu negara untuk menyampaikan misi diplomatiknya yang ditujukan ke dalam negeri maupun keluar negeri.

Penelitian kedua yang berhasil penulis temukan adalah jurnal yang dilakukan oleh Adhitia Pahlawan Putra (2012) yang berjudul “Diplomasi dan Negosiasi: Analisa Kasus Media Massa”. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh media asing yang bersifat positif dan negatif. Pengaruh negatif sering ditimbulkan oleh pemberitaan media atau pers yang partisan. Sedangkan untuk pemberitaan dan opini media atau pers yang objektif dan positif, tentunya justru perlu mempertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masalah atau isu yang bersangkutan. Media dalam diplomasi sangat penting karena menjadi *“Opinion Leader”* sehingga untuk melakukan diplomasi itu harus mempunyai *channel* atau akses dengan media. Bahkan media sering disebut sebagai cabang keempat *(the fourth estate)* dalam sistem kenegaraan setelah tiga cabang pemerintahan lainnya yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini menunjukan besarnya peranan media dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Penelitian ketiga yang berhasil penulis temukan adalah jurnal yang ditulis oleh Ayu Mellisa (2012) yang berjudul “Media Internasional dan Pengaruhnya dalam Hubungan Internasional”. Dalam jurnal ini, penulis memaparkan bahwa media internasional merupakan alat yang bisa dengan mudah masuk ke sebuah negara dengan cara yang halus dan kadang tidak disadari membawa kepentingan-kepentingan yang bisa mengancam eksistensi sebuah negara atau aktor-aktor lainnya. Media juga mempunyai kemampuan untuk menjadi investigator akan sebuah isu. Media akan melihat dari sisi pemerintah atau pihak berwenang dan dari sisi masyarakat awam. Kekuatan media internasional ini juga berkesinambungan dengan kekuatan negara yang ada di belakangnya, jadi negara dan media memiliki hubungan kerjasama yang akan menguntungkan dikedua belah pihak.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang media internasional. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada media massa dan media sosial sebagai instrumen diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri khususnya dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

**B.Kerangka Teoritis**

Untuk membantu penelitian ini, penulis membutuhkan teori-teori yang kemudian dijadikan kerangka teoritis sehingga dapat menjadi dasar atau pendukung penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut juga diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini hingga akhirnya pesan yang dimaksud dapat disampaikan dengan baik.

Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti yakni Peran Media Massa dan Media Sosial terhadap Diplomasi dan Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Periode Pemerintahan PresidenDonald Trump. Teori dan konsep ilmiah yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini tentu didasarkan pada masalah penelitian seperti yang disebutkan diatas, agar tidak terjadi salah presepsi dan kekeliruan interpretasi nantinya. Selanjutnya konsep-konsep yang dipakai penulis tentunya berasal dari para ahli studi Hubungan Internasional dan aktor-aktor politik internasional yang mempunyai korelasi dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

Mengawali pemaparan dalam kerangka teoritis ini, terlebih dahulu dipahami tentang definisi dari Hubungan Internasional itu sendiri.

**1.Pengertian Hubungan Internasional**

Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam bukunya, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 4 menyatakan definisi Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

“Hubungan Internasional adalah studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis atau subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya.“[[1]](#footnote-2)

Didukung oleh pernyataan dari Mohtar Mas’oed dalam bukunya *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990) bahwa definisi Hubungan Internasional adalah:

“Awal memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun aktor non-negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional.”[[2]](#footnote-3)

K.J Holsti dalam bukunya *International Politics: A Framework of Analysis,* (Prentice-Hall of India, 1992) mendefinisikan Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

“Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak…ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan interasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etik internasional.”[[3]](#footnote-4)

**2.Pengertian Komunikasi**

Dapat dilihat bahwa didalam Hubungan Internasional terdapat banyak aktor-aktor yang terlibat, salah satu aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional adalah media massa. Namun, sebelum menjelaskan secara luas mengenai media massa, penulis terlebih dahulu melihat konsep dan teori yang lebih luas yakni komunikasi. Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Wiryanto hlm. 7 dijelaskan, komunikasi adalah:

“Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi.”[[4]](#footnote-5)

Secara terminologis, para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi dari berbagai prespektif, yakni prespektif filsafat dan sosiologis.[[5]](#footnote-6)

1. Dalam prespektif filsafat, merujuk pada kerangka yang sering dikutip dalam buku Aristoteles yang berjudul De Arte Rhetorica. Aristoteles merumuskan komunikasi pada tiga komponen pokok, yaitu: siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan.
2. Dipandang dari prespektif sosiologis, Edwin Neumann mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi berfungsi (Rakhmat, 1997:8). Lebih lanjut, Rakhmat menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang hubungan sosial dimana individu-individu berinteraksi dan saling memengaruhi (Rakhmat, 2007:10).

**3.Pengertian Komunikasi Internasional**

Karena penulis mengambil Hubungan Internasional sebagai studi, maka secara spesifik teori-teori yang didukung dalam penelitian ini secara internasional pula. Menurut K.S Sitaram, Komunikasi Internasional adalah:

“Komunikasi internasional adalah komunikasi antara struktur-struktur politik alih-alih antara budaya-budaya individual, artinya komunikasi internasional sering dilakukan lewat para pemimpin negara atau wakil-wakil negara (menteri luar negeri, duta besar, konsul jenderal).”[[6]](#footnote-7)

Didukung pernyataan dari Onong Uchjana Effendy, definisi Komunikasi Internasional adalah:

“Komunikasi Internasional adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan, dan kerja sama, melalui berbagai media komunikasi atau media internasional.”[[7]](#footnote-8)

Liliweri (2001:22) secara spesifik mejelaskan studi Komunikasi Internasional didasarkan pada pendekatan-pendekatan maupun metodologi. Pendekatan-pendekatan ini antara lain: (1). Pendekatan peta bumi *(geographical approach);* (2). Pendekatan media *(media approach);* (3). Pendekatan peristiwa *(event approach);* (4). Pendekatan ideologis *(ideology approach).[[8]](#footnote-9)* Selanjutnya Komunikasi Internasional pun terbagi dalam beberapa perspektif, antara lain:

1. Perspektif Jurnalistik

Dalam perspektif jurnalistik, komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat *Mass Medicated Communication* (MMC) yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideology, politik, tingkat perkembangan ekonomi, dan sebagainya.[[9]](#footnote-10)

1. Perspektif Diplomatik

Dalam perspektif diplomatik, komunikasi internasional adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah dengan negara lain melalui saluran diplomatik. Dalam perspektif ini, komunikasi internasional lazimnya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil.[[10]](#footnote-11)

1. Perspektif Propagandistik

Dalam perspektif propagandistik, komunikasi internasional lebih ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan. Upaya propaganda bukan sekedar untuk mengarahkan opini publik internasional, melainkan untuk memengaruhi pikiran, perasaan, serta tindakan pemerintah dan khalayak (publik) di negara lain, baik negara lawan atau kawan.[[11]](#footnote-12)

Komunikasi Internasional yang melibatkan media massa, tentu saja menggunakan pers dalam kegiatannya pula. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan gagasan *framing* yang biasanya digunakan oleh media massa dalam menyajikan suatu berita kepada masyarakat. Gagasan mengenai *framing* pertama kali oleh Beterson tahun 1955. Pada mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffmann pada tahun 1974 yang mendefinisikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.[[12]](#footnote-13) Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini lebih mencermati strategi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti dan lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.[[13]](#footnote-14) Todd Gitlin mendefinisikan *framing* sebagai sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampikan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. *Frame* adalah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas.[[14]](#footnote-15)

**4.Pengertian Politik Luar Negeri**

Selanjutnya penulis akan memaparkan teori-teori mengenai apa saja yang Hubungan Internasional lakukan. Salah satu perhatian di dalam Hubungan Internasional adalah masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional. Didalam Politik Luar Negeri, negara dipandang sebagai penengah dalam memperjuangkan kepentingannya di dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar dapat bersaing dengan negara lain.

Menurut Carlton Clymer Rodee et al., mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain … (yaitu) bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”[[15]](#footnote-16)

Didukung dari pernyataan Dugis (2010) mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

“Suatu aksi otoritatif yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempertahankan situasi internasional yang menguntungkan atau mengubah situasi internasional yang tidak menguntungkan.”

Oleh karena itu, Politik Luar Negeri sebuah negara ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau mempromosikan perubahan dalam situasi internasionalnya.[[16]](#footnote-17) Dalam menjalankan suatu politik luar negerinya, suatu negara akan mengaplikasikan melalui kebijakan-kebijakan luar negeri. Singkatnya, politik luar negeri lebih bersifat teoretikal sedangkan kebijakan luar negeri lebih cenderung ke arah praktikal. James N. Rosenau menguraikan beberapa langkah politik luar negeri hingga pengaplikasiannya melalui kebijakan luar negeri. Ia mendefinisikan politik luar negeri sebagai seperangkat prinsip yang mendasari adanya hubungan luar negeri antar negara satu dengan negara lain. Seperangkat prinsip ini dapat mengacu pada sebuah rencana strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Akhirnya rencana tersebut diterjemahkan menjadi langkah yang nyata yakni berupa memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.[[17]](#footnote-18)

Miroslav Nincic mengungkapkan terdapat tiga asumsi dasar dalam kepentingan nasional, yaitu *pertama* kepentingan tersebut bersifat vital dalam pencapaiannya harus menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. *Kedua* kepentingan tersebut berkaitan dengan lingkungan internasional, jadi pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. *Ketiga* kepentingan tersebut harus tidak memihak kepada salah satu instansi ataupun kelompok manapun melainkan harus mewakili dari seluruh aspirasi masyarakat.[[18]](#footnote-19) Kepentingan nasional yang sudah menjadi tujuan negara harus diterapkan melalui sebuah kebijakan luar negeri, sebelum menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah, terlebih dahulu harus melalui pengesahan dari sebuah badan legislatif, setelah adanya pengesahan maka kebijakan tersebut dapat terealisasikan. Untuk itu kepentingan nasional sangat berkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, karena dengan kebijakan luar negeri maka usaha suatu negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan terhadap warga negaranya menjadi lebih terjamin.

**5.Pengertian Kebijakan Luar Negeri**

Membahas tentang Kebijakan Luar Negeri, Perwita & Yani dalam bukunya *“Pengantar Hubungan Interasional: Keadilan dan Power”* (Bandung: Abardin) hlm. 49-50 mendefinisikan Kebijakan Luar Negeri sebagai berikut:

“Kebijakan Luar Negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuat keputusan negara *(decision maker)* dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi *national interest*.”[[19]](#footnote-20)

Menurut Mark R. Amstutz, Kebijakan Luar Negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interest beyond a country’s territorial boundries*.[[20]](#footnote-21) Dalam definisi ini ada 3 tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan negara. Dengan demikian, semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.[[21]](#footnote-22) Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor di lingkugan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.[[22]](#footnote-23)

**a. Fungsi Umum Kebijakan Luar Negeri**

Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing;
3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan;
4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya bantuan kemanuasiaan dan strategi hak asasi manusia.[[23]](#footnote-24)

K.J Holsti mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

**b. Sumber Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat**

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kelima landasan itu adalah:

1. *External Sources* (Sumber Eksternal) meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *External Sources* mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara.
2. *Societal Sources* (Sumber Masyarakat) yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspel non pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, opini publik, dan lain-lain.
3. *Govermental Sources* (Sumber Pemerintah) meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan *foreign policy* baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak-pihak didalam pemerintahan.
4. *Role Sources* (Sumber Peranan), *role* disini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
5. *Individual Sources* (Sumber Individu) meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi presepsinya, karakter dan lain-lain. Hal-hal inilah yang mempengaruhi persepsi, pilihan-pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambil keputusan dari pengambil keputusan yang lain.[[24]](#footnote-25)

Leonardo Hutabarat juga mengemukakan bahwa elemen dalam pembuatan kebijakan luar negeri didasarkan pada para pembuat keputusan itu sendiri, sehingga sebuah kebijakan tidak akan terlaksana tanpa adanya komitmen untuk mencapai tujuan dengan keseimbangan antara kemamouan yang diperlukan dalam pengimplementasiannya.[[25]](#footnote-26) Hutabarat juga mengatakan bahwa *size, status, resources* dan *human factors* adalah elemen kunci dalam studi kebijakan luar negeri selain itu juga karena situasi geopolitik suatu negara dan tantangan yang dihadapinya dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang kebijakan luar negeri di terminologikan dalam konteks politik umum dalam pemerintahan, seperti *democracy, dictatorship* (pemerintahan yang diktator), *stability* dan *instability.[[26]](#footnote-27)*

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangat penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dan dalam mempengaruhi langkah-langkah yang akan diambil. Tabel dibawah adalah gambaran kepentingan nasional yang dijabarkan kedalam tujuan kebijakan luar negeri serta tindakan dalam pencapaiannya.[[27]](#footnote-28)

Tabel 1. Gambaran Kepentingan Nasional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kepentingan**  **Nasional** | **Tujuan Kebijakan Luar Negeri** | **Tindakan atau Implementasi** |
| Kedaulatan dan keutuhan territorial | Mobilisasi dukungan negara tetangga, negara besar dan organisasi internasional | Pengiriman misi diplomatik |
| Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi | Meyakinkan negara donor dan investor asing untuk memberikan bantuan luar negeri dan investasi asing | Perundingan dana untuk mendukung pemilihan umum dan pendidikan demokrasi |
| Penyebaran *core values* seperti demokrasi dan hak azasi manusia suatu negara (khususnya Amerika Serikat) | Peningkatan peran gerakan demokrasi dan *civil society* | Penyaluran dana untuk mendukung pemilihan umum dan pendidikan demokrasi |
| Keamanan nasional dan regional | Pembentukan dan revitalisasi aliansi militer dan kerjasama regional | Penandatanganan pakta militer dan militer bersama |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, setiap kepentingan nasional yang menjadi agenda suatu negara harus diimplementasikan dalam sebuah kebijakan luar negeri. Untuk itu harus dijelaskan bagaimana sebuah kebijakan luar negeri itu diimplementasikan, *pertama* adalah kedaulatan dan keutuhan territorial. Demi menjaga keutuhan dan kedaulatan territorial suatu negara maka setiap negara harus mendapatkan dukungan dari beberapa negara terutama negara-negara besar dan juga organisasi internasional. Agar dapat memiliki hubungan yang baik dengan berbagai negara maka diutuslah seorang diplomat dengan membawa misinya yang dijelaskan sebelumnya.

*Kedua,* dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka suatu negara berusaha mencari pendonor dan juga investor asing agar mau untuk menanamkan saham dalam negaranya. Atas penanaman saham tersebut maka akan membuat tingkat perekonomian suatu negara menjadi lebih baik. Tindakannya adalah dengan merundingkan bahwa dana yang didapat dari pendonor adalah untuk pendidikan demokrasi dan khususnya untuk pengembangan kualitas masyarakat. *Ketiga,* kepeningan nasional berupa penyebaran demokrasi dan hak asasi manusia khususnya bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat gencar untuk menanamkan sistem demokrasi terhadap suatu negara, untuk itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat salah satunya dengan meningkatkan gerakan demokrasi dan juga *civil society*. Gerakan tersebut diimplementasikan dengan cara memberikan penyaluran dana terhadap suatu negara untuk mendukung pemilihan umum dan pendidikan demokrasi. *Keempat* adalah keamanan nasional dan regional. Keamanan suatu negara itu sangat penting, mengingat bahwa sebuah negara mempunyai rakyat yang harus dilindungi, dengan adanya rasa aman maka akan menciptakan suasana yang nyaman dan tentram. Untuk itu sebuah negara perlu untuk membentuk atau mengaktifkan kembali sebuah aliansi kerjasama militer baik dalam bidang regional maupun internasional. Kerjasama tersebut diimplementasikan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian pakta militer atau lainnya.[[28]](#footnote-29)

**6.Pengertian Diplomasi**

Didalam studi Hubungan Internasional juga terdapat istilah yang dinamakan Diplomasi. Menurut Harold Nicholson yakni seorang pengkaji dan praktisi dalam bidang diplomasi pada abad ke-20 menegaskan bahwa kata diplomasi digunakan untuk menegaskan paling tidak 5 hal yang berbeda. Dari ke-5 hal tersebut, 4 hal yang paling penting adalah politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi dan suatu cabang dinas luar negeri. Nicholson pun menyatakan bahwa interpretasi yang ke-5 adalah suatu kualitas abstrak dalam arti baik merupakan keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.[[29]](#footnote-30) KM Panikkar menyatakan bahwa Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain.[[30]](#footnote-31)

Svarlien juga menyatakan bahwa diplomasi adalah seni dan ilmu perwakilan Negara dan perundingan. Kata yang sama juga telah dipakai untuk menyatakan secara umum keseluruhan kompleks hubungan luar negeri suatu Negara, yakni departemen luar Negeri termasuk perwakilan negerinya. Sedangkan menurut Harold Nicholson, diplomasi itu adalah[[31]](#footnote-32):

1. *The management of internal relation by means negotiation;*
2. *Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations;*
3. *The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; and*
4. *The bussines of art of the diplomatic.*

Bantarto membagi Diplomasi menjadi beberapa bentuk, 4 diantaranya adalah diplomasi pribadi (*personal diplomacy by foreign secretary),* diplomasi tingkat tinggi *(summit diplomacy),* diplomasi konferensi *(conference diplomacy),* dan diplomasi parlementer *(parliamentary diplomacy).* Diplomasi pribadi biasanya dilakukan oleh seorang Menteri Luar Negeri, sehingga terkesan mengurangi efektivitas kerja seorang duta besar. Diplomasi tingkat tinggi berarti diplomasi yang dilakukan oleh kepala-kepala Negara atau kepala-kepala pemerintahan. Diplomasi bentuk ini hanya akan terjadi jika ada kebutuhan yang bersifat *basic.* Diplomasi konferensi merupakan diplomasi yang terjadi dalam forum-forum multilateral. Alasan dipakainya diplomasi konferensi ini ialah karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Negara-negara didunia serta keinginan Negara-negara baru dan kecil untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar Negara.[[32]](#footnote-33)

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan Negara-negara jajahannya.[[33]](#footnote-34) Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan antar Negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.[[34]](#footnote-35) Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan hal ini adalah “Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada Negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi”. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional , yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan Negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling menukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman.[[35]](#footnote-36) Sebagai aktor diplomatik, pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan, peranan itu dimainkan oleh politikus dan negarawan. Seperti dikatakan oleh Clark, diplomat mungkin menentang kebijakan politik Negara tempat dia bekerja dan Negara yang diwakili, tetapi mereka tetap diharapkan untuk menyampaikan kebijakan tersebut dan mendukung bahkan jika kebijakan tersebut dan mendukung bahkan jika kebijakan tersebut tidak mereka yakini secara pribadi.[[36]](#footnote-37) Sebagai pelaksana kebijakan luar negeri, diplomat menyampaikan detail kebijakan pemerintah Negara lain, menjelaskannya, dan memperoleh dukungan dan jika dikehendaki, menegosiasikan kesepakatan untuk meningkatkan dan mewujudkannya.[[37]](#footnote-38) Diplomat dapat memberi nasihat kepada pemerintahnya mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi posisi tawar dan kekuatan sebuah Negara. Berdasarkan nasihat-nasihat yang diberikan, pemerintah dapat menetapkan kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan dalam waktu dan kondisi tertentu. Kenyataannya, kebijakan suatu Negara juga dapat diterapkan tanpa mendengarkan masukan dari para diplomat.

**7. Pengertian Media Massa**

Seiring berkembangnya globalisasi, diplomasi telah berubah praktiknya dari tradisional menjadi non-tradisional atau diplomasi multi jalur *(multi track diplomacy)*. Diplomasi tradisional adalah diplomasi yang pada kegiatannya melibatkan aktor negara *(state)* yakni diplomat dalam menjalankan hubungan antar negaranya. Sebaliknya, diplomasi non-tradisional atau diplomasi multi jalur *(multi track diplomacy)* adalah diplomasi yang pada kegiatannya melibatkan aktor non-negara *(non-state)* pada kegiatannya dalam berhubungan dengan negara lain. Salah satu aktor dalam diplomasi multi jalur *(multi track diplomacy)* adalah media massa. Media massa menjadi salah satu aktor dalam diplomasi multi jalur *(multi track diplomacy)* karena media massa mampu memberikan pengaruh serta memberikan sebuah konstruksi sosial terhadap masyarakat, dan merupakan sebuah alat yang sangat efektif dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang.[[38]](#footnote-39)

Vincent Mosco dalam bukunya *“The Political of Communication”* (New York: Sage, 1996) hlm. 150-156, mendefinisikan media massa sebagai:

“Media massa merupakan sebuah institusi yang memiliki serangkaian kegiatan produksi budaya dan informasinya dilaksanakan oleh berbagai tipe ‘komunikasi massa’ untuk disalurkan kepada khalayak sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku.”[[39]](#footnote-40)

Media Massa adalah media komunikasi yang jangkauan nya mencakup banyak orang. Dewasa ini, media massa telah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat karena media massa adalah sarana untuk memperoleh berita dan informasi. Tanpa kita sadari, media massa menimbulkan efek yang kuat dalam membentuk presepsi khalayak.[[40]](#footnote-41) Adanya berita atau penyiaran yang dipublikasikan secara terus menerus dan mempunyai konten yang sama, terkadang dapat membuat pola pikir masyarakat tertuju dan terpengaruh oleh berita yang disiarkan oleh media. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat saat ini, dimanfaatkan oleh berbagai media massa dalam perannya dalam menyampaikan informasi, edukasi, opini dan ilmu pengetahuan kepada para pembacanya. Dalam mencukupi kebutuhan khalayak tersebut, media massa umumnya selalu aktif dalam memproduksi informasi yang cepat, hangat dan orisinil. Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni media massa cetak dan media massa elektronik.[[41]](#footnote-42) Media massa diyakini memiliki kekuatan yang maha dahsyat dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa dengan mudah dapat mengarahkan masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan dimasa mendatang.[[42]](#footnote-43) Media massa*online* memiliki peran dalam memajukan peradaban umat manusia yang kian pesar didorong tak luput dari peran teknologi komunikasi yang serba canggih. Bahkan tak jarang kecanggihan tersebut disalahgunakan, sehingga media massa memiliki dua peranan yakni memperburuk sisi kemanusiaan seseorang (dehumanisasi) atau memperkuat dan menajamkan *sense of humanity* (humanisasi).

**a. Fungsi Dasar Media Massa**

Seperti yang dikutip dari Charles Wright dalam buku karya Brent D. Ruben yang berjudul *“Communication and Human Behavior”* (New Jersey: Prentice Hall, 1992) hlm. 270-271 menggambarkan empat fungsi dasar media massa, yakni:

1. Pengamat lingkungan *(Surveillance)*

Media memberikan pesan-pesan secara terus menerus melalui pemberitaan mereka yang memungkinkan anggota masyarakat menyadari perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi mereka. Pengamat lingkungan juga memiliki fungsi pengawasan, yang memperingatkan masyarakat akan bahaya, misalnya angin topan atau polusi udara.

1. Korelasi *(Correlation)*

Media massa menghubungkan dan mengartikan pesan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Fungsi korelasi membantu khalayak masyarakat menentukan relevansi berbagai informasi pengawasan apa yang berguna bagi mereka.

1. Sosialisasi *(Socialization)*

Sebagian merupakan fungsi pengamat lingkungan dan korelasi; komunikasi melalui media massa mensosialisasikan individu-individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Media massa memberikan berbagai pengalaman yang umum, harapan-harapan yang sama, perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai, dan mengkontribusikan berbagai kreasi kebudayaan umum dan konsensus kebudayaan. Komunikasi dalam media massa juga memainkan sebuah peran penting dalam mentransmisikan warisan kebudayaan dari generasi ke generasi.

1. Hiburan *(Entertainment)*

Media massa asalah sumber yang dapat menyediakan hiburan massa dan menyediakan hiburan dasar, serta menyiarkannya bagi khalayak masyarakat.

**8. Pengertian Media Sosial**

Menurut Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Bussines Online* mendefinisikan Media Sosial sebagai berikut:

*“Social media is a new set of communication and collaboration tools that enable many types of interactions that were previously not available to the common person.”*

Sedangkan menurut Dailey (2009:3) media sosial adalah konten yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan mudah diakses dan terukur. Hal yang paling utama dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, memperoleh bacaan dan berita, serta mencari konten dan informasi. Ada ratusan saluran media sosial yang beroperasi diseluruh dunia saat ini, dimana yang termasuk dalam 3 besar seperti hal nya facebook, LinkedIn, dan twitter.[[43]](#footnote-44)Media sosial atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia.[[44]](#footnote-45)

**a. Karakteristik Media Sosial**

Menurut Hadi Purnama (2011:110) media sosial memiliki beberapa karakteristik khusus, yakni[[45]](#footnote-46):

1. Jangkauan yang bisa meliputi skala khalayak kecil dan khalayak global;
2. Lebih mudah diakses public dengan biaya yang lebih terjangkau;
3. Media sosial relatif lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus;
4. Media sosial dapat memancing respon khalayak lebih cepat;
5. Media sosial dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.

**C. Hipotesis**

Berdasarkan asumsi dan kerangka teori diatas, maka penulis membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**“Media Massa dan Media Sosial sebagai aktor diplomasi dapat mempengaruhi aktivitas diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya pada periode pemerintahan Presiden Donald Trump.”**

**D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Media Massa dan Media Sosial sebagai aktor diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri. | 1. Media massa telah menjadi aktor non negara *(state)* dalam aktivitas pemerintahan (diplomasi). | 1. Globalisasi telah mengubah praktik diplomasi tradisional menjadi non tradisional. Diplomasi tradisional adalah praktik diplomasi yang melibatkan diplomat sebagai aktor dalam hubungan luar negeri. Sebaliknya, diplomasi non tradisional adalah diplomasi yang melibatkan aktor non-negara seperti media massa dalam hubungan luar negerinya. 2. Peran media massa semakin signifikan dalam teknologi informasi praktik diplomasi. Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa halangan birokratis. Media massa modern juga telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat” *(diplomacy without diplomat)*. |
| 1. Media Sosial menjadi medium komunikasi baru dalam diplomasi | 1. Dalam hubungan diplomatik antar Negara, media sosial sangat diperlukan untuk meng-*update* mengenai Negara sahabatnya. Inilah yang kemudian membuat peran jurnalis dan pers sangat penting untuk memberikan berita ter-*update* mengenai wacana serta isu yang sedang terjadi. Adanya elemen non-human dalam media sosial yakni *Hashtag* yang berfungsi untuk mempercepat pengabaran. Dengan daya update-nya supercepat disertai hashtag yang bisa menginformasikan apa yang sedang ramai dibicarakan, membuatnya menjadi data berharga untuk mengetahui kabar-kabar terbaru. |
| 1. Adanya pengaruh media massa terhadap diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri. | 1. Media massa sebagai alat komunikasi memiliki pengaruh terhadap politik, yang berkaitan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi yang mengatur perbuatan dan sikap manusia dalam situasi konflik yang berlandaskan akan konsekuensi. (Jalaludin Rakhmat, Komunikasi Politik “Komunikator, Pesan dan Media”) 2. Dalam komunikasi politik, media massa mempunyai posisi dan peran sebagai penyampai (transmitters) berbagai macam pesan-pesan politik dari pihak-pihak diluar dirinya, dan juga sebagai pengirim (sender) pesan politik yang dibuat (constructed) oleh para wartawan kepada pemirsa (audience). 3. Media massa juga berperan sebagai aktor diplomasi yang dijalankan oleh suatu negara dalam mencapai tujuan yang akan dicapainya. Karena saluran-saluran yang dijalankan oleh media massa sangat efektif dalam mempengaruhi suatu penilaian seseorang terhadap suatu masalah atau kasus yang sedang terjadi. (Robert Jackson & Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional” hlm. 307) |
| **Variabel Terikat:**  Aktivitas diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam periode pemerintahan Presiden Donald Trump. | 1. Presiden Donald Trump secara aktif menggunakan media sosialnya yakni Twitter dalam menjalankan aktivitas Diplomasi dan Pengambilan Kebijakan Luar Negerinya. | 1. Media dianggap sebagai instrumen atau alat dalam perpolitikan. Selain itu,fungsi dan peranan media juga sebagai sebagai instrumen dalam membantu PresidenAmerika Serikat untuk membentuk opini publik terkait isu ataupun kebijakan tertentu serta sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat. ( A. Julastri, “*Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Pembajakan Mavi Marmara”* hlm. 36) 2. Interaksi Trump dengan Twitter dimulai sama seperti para tokoh-tokoh terkenal dunia, yaitu dikelola oleh para professional. Antara Mei 2009 hingga Mei 2011, Trump menulis pesan hanya sedikit lebih banyak dari 275 kali. Berdasarkan data tahun 2011, cuitannya meningkat dari sekitar 150 persen per tahun menjadi lebih dari 100 cuitan per bulan. Trump nampaknya memang lebih suka Twitter dibanding media konvensional. 3. Dalam masa pemilu, Trump melakukan strategi pemenangan yang terukur dan memaksimalkan penggunaan sosial media, bukan saja berhasil memelihara dan meningkarkan elektabilitasnya, tapi juga menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat untuk memilihnya. |

**E.Skema Kerangka Teoritis**

Globalisasi

Berkembangnya aktivitas diplomasi

Diplomasi tradisional Diplomasi non-tradisional

(Multijalur)

Faktor yang mempengaruhi Diplomasi:

1. Teknologi Informasi

2. Meningkatnya peran Media Massa

3. Munculnya Media Sosial sebagai medium baru Diplomasi

Media Massa dan Media Sosial



Aktivitas diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri

Periode Pemerintahan Presiden Donald Trump  Penggunaan Media Sosial dalam aktivitas Pemerintahan

a

1. Mempengaruhi serta berperan dalam praktik diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
2. Membentuk dan menentukan sebagian besar opini publik.

1. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (Edisi Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 12 [↑](#footnote-ref-3)
3. K.J Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis,* (Prentice-Hall of India, 1992), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 7 [↑](#footnote-ref-5)
5. Drs. Mohammad Shoelhi, M.B.A., M.M., *Komunikasi Internasional Prespektif Jurnalistik* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ema Apriyani, M.Sc, “Cakupan Komunikasi Internasional (1)” dalam <http://eprints.binadarma.ac.id/1386/1/KOMUNIKASI%20INTERNASIONAL%28KP%29%20MATERI%202.pdf> diakses 26 Desember 2017, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,*hlm. 3 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,*hlm. 7 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hlm. 10 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,*hlm. 13 [↑](#footnote-ref-11)
11. Drs. Mohammad Shoelhi, M.B.A., M.M., *Komunikasi Internasional Prespektif Jurnalistik* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), hlm. 33 [↑](#footnote-ref-12)
12. Alex Sobur, *“Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 161-162 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,*hlm. 162 [↑](#footnote-ref-14)
14. Eriyanto, *“Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”,* (Yogyakarta: LKIS, 2002) hlm. 68 [↑](#footnote-ref-15)
15. Carlton Clymer Rodee, et al., *“Pengatar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 499 [↑](#footnote-ref-16)
16. Walter Carlsnaes, *“Foreign Policy”* dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse dan Beth Simmons (eds.), Handbook of International Relations (New York: Sage) hlm. 331-349 [↑](#footnote-ref-17)
17. James N. Rosenau, *“The Study of Foreign Policy”* dalam James N. Rosenau, Kenneth Thompson dan Gavin Boys (eds.) (New York: Free Press, 1976) hlm. 16 [↑](#footnote-ref-18)
18. Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hlm. 67 [↑](#footnote-ref-19)
19. Perwita A.A & Yani Y.M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 49-50 [↑](#footnote-ref-20)
20. Aleksius Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hlm. 64 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* hlm.64 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid,* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-23)
23. David P Fidler, *“Health in Foreign Policy: An Analytical Overview”,* dalam *Political Journal* Vol. 15, No. 3, (United Kingdom: Taylor & Francis Ltd., hlm. 11 [↑](#footnote-ref-24)
24. Eugene R. Wittkoff, Charles W Jr Kegley, dan James M Scott, *American Foreign Policy,* Sixth Edition (United States Thompson Wadsworth, 2003) hlm. 16-19 [↑](#footnote-ref-25)
25. Leonard Hutabarat, *“Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional”* dalam jurnal *Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Vol. V, No. 22, Mei, 2005) hlm. 15 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* hlm. 16 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid,* hlm. 70 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-29)
29. Harold G. Nicholson, *Diplomacy* (London: Oxford University Press, 3rd edn 1963) [↑](#footnote-ref-30)
30. K.M Panikkar, *The Principles and Practice of Diplomacy* (Bombay: Asia Pub. House, 1956) [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
32. Bantarto Bandoro, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia (1994) [↑](#footnote-ref-33)
33. Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice* (Longman Green & Co. New York, 1992) [↑](#footnote-ref-34)
34. R.P Barston, *Modern Diplomacy* (Longman, New York, 1997) [↑](#footnote-ref-35)
35. Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori & Praktik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) [↑](#footnote-ref-36)
36. Eric Clark, *Diplomat*, *The World of International Diplomacy* (Taplinger Pub. Co. New York, 1973) [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-38)
38. Denis McQuail, “*Teori Komunikasi Massa*”, (Jakarta: Erlangga, 1989) hlm. 3 [↑](#footnote-ref-39)
39. Vincent Mosco,*“The Political of Communication”,* (New York: Sage, 1996) hlm. 150-156 [↑](#footnote-ref-40)
40. Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) [↑](#footnote-ref-41)
41. Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2004) [↑](#footnote-ref-42)
42. Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Rajawali Pers, 2009) [↑](#footnote-ref-43)
43. Muhammad Badri, *Social Media Relation di Era Web.* (Jurnal Risalah vol. XXI, Edisi April) hlm. 132 [↑](#footnote-ref-44)
44. “Media Sosial” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial> diakses 20 November 2017. [↑](#footnote-ref-45)
45. Hadi Purnama, *Media Sosial di Era Pemasaran 3.0.* (Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana) hlm. 110 [↑](#footnote-ref-46)